

Mengelola Inovasi di Sektor Publik Indonesia: Tinjauan Literatur dan Pengembangan Model UTAUT-IPS

Ahmad Bramantyo Nursasotyosidi¹, Misbahuddin Azzuhri²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

¹ahmadbramantyon@student.ub.ac.id, ¹misbah@ub.ac.id

Abstract

Public sector innovation plays a critical role in addressing global challenges and enhancing the quality of public services. However, in Indonesia, many public sector innovations lack sustainability and fail to be implemented over the long term. This study aims to identify and analyze the factors influencing the sustainability of public sector innovation in Indonesia through a literature review approach. By integrating the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology for Innovation in the Public Sector (UTAUT-IPS), this review maps relationship between internal factors (such as managerial support, innovation characteristics, and users' behavioral intention) and external factors (such as political pressure and cross-sector collaboration) in shaping innovation sustainability. The analysis demonstrates that UTAUT-IPS model offers a comprehensive conceptual framework for understanding and designing strategies to sustain innovation in the public sector. This study contributes theoretically to the development of innovation adoption and sustainability models, and offers strategic insights for policymakers and public sector practitioners in Indonesia.

Keywords: Public Sector Innovation; Innovation Sustainability; UTAUT-IPS; Behavioral Intention; Innovation Adoption; Public Management in Indonesia

Abstrak

Inovasi sektor publik memiliki peran penting dalam menjawab tantangan global dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, di Indonesia, banyak inovasi sektor publik tidak berkelanjutan dan gagal terimplementasi dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan inovasi sektor publik di Indonesiamelalui pendekatan literatur review. Dengan mengintegrasikan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology for Innovation in the Public Sector (UTAUT-IPS)*, kajian ini memetakan hubungan antara faktor internal (seperti dukungan manajemen publik, karakteristik inovasi, dan niat berperilaku pengguna) dan faktor eksternal (seperti tekanan politik dan kolaborasi lintas sektor) dalam membentuk keberlanjutan inovasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa model UTAUT-IPS dapat menjadi kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami dan merancang strategi keberlanjutan inovasi di sektor publik. Penelitian ini memberikann kontribusi teoritis bagi pengembangan model adopsi dan keberlanjutan inovasi, serta menawarkan strategis bagi pembuat kebijakan dan praktisi sektor publik di Indonesia.

Kata kunci: Inovasi Sektor Publik; Keberlanjutan Inovasi; UTAUT-IPS; Behavioral Intention; Adopsi Inovasi; Manajemen Publik Indonesia

Pendahuluan

Lingkungan manajerial organisasi sektor publik dan nirlaba telah mengalami perubahan signifikan, karena adanya tuntutan akuntabilitas dengan diiringi kompleksitas yang meningkat sehingga organisasi publik perlu lebih efisien dan transparan. Perubahan dalam pendekatan manajemen sangat diperlukan karena karakteristik struktur birokrasi yang kaku kerap menjadi penghambat. Pemerintah ditantang oleh teknologi dan perubahan sosial yang cepat untuk berubah dari sekedar peran tradisionalnya sebagai regulator. Akan tetapi, lembaga-lembaga sektor publik seringkali kurang memperhatikan inovasi dan terlalu fokus pada struktur organisasi, pengatur, dan perencanaan yang menjadikannya birokratis, terpusat, dan mengutamakan pendekatan yang sangat teknis (Mazzarol & Reboud, 2020).

Sektor publik telah menghadapi desakan masyarakat akan pelayanan yang responsif dan akuntabel. Tekanan dari berbagai pihak, seperti kelompok lingkungan, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat sendiri, berupa transparansi dan efisiensi biaya operasional yang semakin meningkat, harus dihadapi dengan bijak oleh sektor publik. Mazzarol & Reboud (2020) mengatakan bahwa untuk mengatasi tantangan ini, keterampilan manajerial yang lebih baik dan restrukturisasi organisasi di sektor publik sangat dibutuhkan. Kebutuhan masyarakat menuntut

pemerintah untuk lebih inovatif, fleksibel, dan responsif. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di sektor publik telah melahirkan lingkungan inovasi yang memungkinkan inovasi masif diterapkan di sektor publik (Bekkers et al., 2011; Criado et al., 2023)

Respon pemerintah terhadap keterbatasan anggaran dan peningkatan masalah sosial yang kompleks menjadi hal yang meletarbelakangi pemerintah untuk berinovasi (Criado et al., 2023). Sektor pemerintah dan non-profit kini menghadapi tekanan untuk lebih kompetitif, layaknya sektor swasta. Sektor pemerintah dan non-profit harus lebih inovatif dalam menciptakan produk, layanan, dan proses baru agar tetap relevan. Peningkatan mekanisme riset guna pemahaman kebutuhan warga dan pengembangan layanan berorientasi pada kepuasan pengguna adalah hal yang harus dilakukan oleh sektor publik. Dilatarbelakangi hal-hal tersebut, sektor publik harus menjadi lebih inovatif, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Inovasi pada sektor publik merupakan salah satu faktor utama untuk mewujudkan tata kelola responsif, efektif, dan efisien guna memenuhi kompleksitas kebutuhan masyarakat. Pendekatan birokratis konvensional yang selama ini menjadi pendekatan yang digunakan oleh sektor publik tidak dapat diandalkan lagi karena derasnya dinamika

global dan perubahan teknologi. Pemicu utama lahirnya berbagai inovasi adalah tekanan globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dipungkiri menuntut sektor publik (Clausen et al., 2020) (Criado et al., 2023).

Namun demikian, keberlanjutan dan pemanfaatan inovasi oleh masyarakat tidak dapat dijamin dengan hanya munculnya sebuah inovasi. Tantangan inovasi sektor publik selanjutnya adalah bukan hanya pada penciptaan inovasinya, namun juga pada bagaimana inovasi tersebut dapat bertahan jangka panjang setelah diciptakan, tidak mengalami stagnasi atau bahkan dihentikan karena tidak adaptif terhadap faktor perubahan internal maupun eksternal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong inovasi sektor publik, seperti kebijakan desentralisasi serta kompetisi inovasi, namun masih terdapat kesenjangan antara inovasi yang berhasil diimplementasikan dengan inovasi yang dapat bertahan dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Inovasi yang hanya berlangsung dalam periode tertentu tanpa adanya mekanisme penjaminan keberlanjutannya, dari hasil penelitian, tercatat cukup banyak.

Penelitian menunjukkan sebagian besar inovasi tidak dapat bertahan dan terimplementasikan dalam jangka waktu yang

lama. Pradana et al. (2022a) melaporkan bahwa hanya sekitar 20% dari inovasi yang telah mendapatkan penghargaan nasional dapat berlanjut lebih dari dua tahun. Tercatat 68% inovasi tersebut bahkan tidak dapat ditelusuri kembali, dan sebanyak 22% secara eksplisit ditinggalkan implementasinya. Penelitian Widodo et al. (2022) juga memperkuat hal ini dalam hasil penelitiannya bahwa kegagalan keberlanjutan inovasi ini dikarenakan lemahnya proses institusionalisasi dan strategi jangka panjang keberlanjutan tidak ada.

Beragam faktor sangat mempengaruhi keberlanjutan inovasi sektor publik, baik faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor eksternal seperti tekanan global, mandat dari pemerintah pusat, tren sosial, dan efektivitas kolaborasi lintas sektor sangat mempengaruhi keberlanjutan dari inovasi (Sørensen & Torfing, 2011) (Korac et al., 2017) (Widodo et al., 2022). Faktor-faktor internal berupa dukungan dari pemimpin politik, peran manajemen publik, dan karakteristik inovasi itu sendiri (tingkat kebermanfaatan, integrasi dengan sistem yang ada, dan kinerja yang dapat dicapai) juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan inovasi (De Vries et al., 2016) (Cinar et al., 2021) (Pradana et al., 2022a).

Penelitian Widodo et al. (2022), menemukan bahwa faktor pembelajaran organisasi, *open innovation*, penggunaan data yang akurat. Keterlibatan aktif pemangku

kepentingan, serta dukungan regulasi dan keuangan menjadi dasar utama agar inovasi dapat berlanjut dan tetap dapat beradaptasi dan berkembang. Inovasi akan menghadapi kegagalan jangka panjang ketika tidak dapat membangun mekanisme umpan balik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak mampu melembagakan praktik inovatif dalam rutinitas organisasi (Cobian & Ramos, 2021) (van Acker & Bouckaert, 2018).

Konsep *behavioral intention* atau niat berperilaku menjadi variabel penting dalam konteks perilaku individu sebagai pengguna inovasi dalam hal model adopsi teknologi dan inovasi seperti *Technology Acceptance Model* (TAM), *Unified of Acceptance and Use of Technology* (UTAT), serta *Innovation Diffusion Theory* (IDT). *Behavioral intention* merupakan kecenderungan individu untuk menggunakan atau melanjutkan penggunaan inovasi. *Behavioral intention* telah menjadi prediktor signifikan dalam hal *actual use* atau tingkat adopsi dari inovasi (Mazzarol & Reboud, 2020) (Venkatesh et al., 2012). Pemahaman terhadap konsep *behavioral intention* dalam sektor publik menjadi penting guna menjawab kesenjangan antara penciptaan inovasi dengan penggunaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab peran *behavioral intention* dalam mendorong penggunaan aktual dan

keberlanjutan inovasi di sektor publik dalam konteks sektor publik di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pembangunan model integratif guna menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan keberlanjutan inovasi sektor publik dengan menggunakan pendekatan literatur review terhadap teori utama yaitu TAM, UTAUT dan IDT ditunjang dengan temuan dari studi yang berfokus pada konteks sektor publik Indonesia.

Inovasi pada Sektor Publik

Menurut (Mazzarol & Reboud, 2020), inovasi dalam kerangka manajemen strategi sektor publik merupakan alat dan cara untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Inovasi adalah proses penerapan ide baru atau teknologi yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam situasi tertentu. Inovasi yang berhasil tidak hanya karena ide kreatif namun lebih bergantung pada kemampuan untuk menerapkannya dan kepekaan politik dalam organisasi. Inovasi pada sektor publik menjadi hal penting dikarenakan kinerja organisasi akan meningkat (De Vries et al., 2016; Pradana et al., 2022b). Inovasi telah terbukti meningkatkan kepuasan kerja pegawai, kualitas layanan publik, serta partisipasi masyarakat (Pradana et al., 2022b).

Inovasi sektor publik merupakan proses memperkenalkan, mengembangkan dan

menerapkan sesuatu yang baru dalam organisasi publik, dalam bentuk perubahan besar (radikal) maupun perubahan kecil (inkremental) (De Vries et al., 2016; Pradana et al., 2022b). Inovasi di sektor publik bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin agar dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Inovasi tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja atau output instansi pemerintah, tetapi juga pada upaya memperkuat kapasitas masyarakat, dunia usaha, dan institusi publik lainnya agar bisa berperan sebagai agen perubahan. Melalui inovasi, pemerintah dapat menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan meningkatkan kepuasan terhadap layanan publik (*Open Government in Indonesia*, 2016).

Inovasi Sektor Publik di Indonesia

Sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara, Indonesia juga telah mendorong budaya inovasinya di sektor publik terutama di tingkat Pemerintah Daerah (Pradana et al., 2022b). Upaya inovasi di Indonesia berkembang melalui proses bertahap dan kebutuhan dan kondisi administrasi negara menyesuaikan percepatan pengembangan solusinya. Negara Indonesia juga telah memiliki regulasi untuk mendorong inovasi di sektor publik melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik serta fleksibilitas dan transparansi dalam tata kelola ASN. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mendukung desentralisasi, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Undang-undang ini juga menciptakan "hak untuk berinovasi," yang memberikan perlindungan hukum bagi inovator daerah jika inovasi yang diterapkan mengalami kegagalan (*Open Government in Indonesia*, 2016).

Strategi untuk mendorong inovasi telah ada sejak tahun 2014 dimana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). KIPP merupakan cara mendorong inovasi sektor publik melalui penghargaan dan kompetisi. KIPP dilatarbelakangi adanya bentuk penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bernama *United Nations Public Service Awards* (UNSPA) untuk inovasi sektor publik yang sukses di berbagai negara. KIPP merupakan sarana pemilihan inovator-inovator sektor publik terbaik untuk mewakili Indonesia dalam UNSPA (Pratama, 2020). Sampai dengan tahun 2024, tercatat sebanyak 26.039 inovasi terdaftar dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (Sinovik) KemenPAN-RB dan sebanyak 1.065 inovasi sektor publik berhasil meraih predikat Top Inovasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, 2024). Saat ini, penyelenggaraan KIPP telah dihentikan untuk sementara waktu oleh KemenPAN-RB guna jeda waktu bagi KemenPAN-RB untuk melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan inovasi dengan program Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

Strategi lain untuk mendorong penerapan inovasi publik juga telah tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi dari 12% pada tahun 2019 menjadi 36% pada tahun 2024 merupakan wujud nyata pemerintah Indonesia untuk mendorong inovasi sektor publik, terutama di tingkat Pemerintah Daerah (Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, 2019). Dukungan akan penciptaan iklim inovasi pada sektor publik yang kondusif ini tetap akan menjadi agenda prioritas RPJMN periode kepemimpinan berikutnya pada tahun 2024 - 2025. Indikasi ini didasari oleh agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Salah satu program yang secara langsung mendorong inovasi di sektor publik adalah Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi. Program ini menekankan pentingnya digitalisasi dan penguatan sistem satu data terpadu. Peningkatan efisiensi, tata kelola, dan pembinaan karier para birokrat untuk mendorong inovasi dalam pelayanan publik

adalah tujuan utama langkah ini (Mawangi, 2024).

Penelitian Pratama (2020) menemukan bahwa inovasi sektor publik di Indonesia didominasi oleh inovasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian sistematis yang dilakukan De Vries et al. (2016) yang mencatat bahwa 27% penelitian tentang inovasi sektor publik fokus pada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik secara langsung. Ujung tombak implementasi kebijakan pemerintah diemban oleh pemerintah daerah dalam konteks ini guna penyediaan layanan yang efektif bagi warga. Tanggung jawab ini membuat pemerintah daerah harus lebih inovatif untuk menghadapi tantangan dalam pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah merupakan regulasi pendukung dalam penciptaan inovasi di tingkat daerah. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pelayanan publik. Peningkatan kualitas layanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah merupakan tujuan utama regulasi ini. Regulasi ini merupakan cerminan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pendanaan dan alokasi anggaran guna mendukung berbagai inisiatif inovasi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Inovasi

Inovasi seharusnya tetap terjaga keberlanjutannya agar kegunaannya dapat dimanfaatkan dan dilanjutkan oleh masyarakat (Widodo et al., 2022). Pentingnya keberlanjutan inovasi telah membuat banyak peneliti melakukan studi untuk mengetahui penyebab dan solusi untuk mengatasinya. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa inovasi tidak mampu bertahan dalam jangka panjang. Setidaknya 10% inovasi dihentikan meskipun telah mendapatkan penghargaan (Borins, 2000; Pradana et al., 2022a). Penelitian Pradana et al. (2022a) juga mencatat hanya 20% inovasi yang bertahan. Pradana et al. (2022a) melaporkan bahwa 68% inovasi tidak lagi bisa ditelusuri setelah lebih dari dua tahun sejak menerima penghargaan. Pradana et al. (2022a) juga menemukan bahwa 22% inovasi akhirnya dihentikan. Keberlanjutan ini merupakan tahap yang sangat penting karena banyak inovasi yang gagal pada tahap perancangan, pengembangan, maupun implementasi. Hanya sedikit inovasi yang berhasil bertahan dan terus digunakan oleh masyarakat (van Acker & Bouckaert, 2018; Widodo et al., 2022).

Keberlanjutan inovai merupakan tahap yang sangat penting karena banyak inovasi yang gagal pada tahap perancangan, pengembangan, maupun implementasi. Hanya sedikit inovasi yang berhasil bertahan dan terus digunakan oleh

masyarakat (van Acker & Bouckaert, 2018; Widodo et al., 2022). Menurut pendapat para ahli, untuk dapat berlanjut, inovasi harus menjadi bagian dari aktivitas rutin dalam organisasi (Cobian & Ramos, 2021; Pradana et al., 2022a). Lapuente & Suzuki (2020) dan Pradana et al. (2022a) menegaskan terdapat empat faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses inovasi.

Faktor pertama adalah faktor politik yang sangat mempengaruhi actor politik, yang terlibat serta berperan sebagai “sponsor” utama dalam mendorong dan memberdayakan pegawai untuk berubah dan lebih inovatif (Bankins et al., 2017; Pradana et al., 2022a). Kebijakan dan arah inovasi yang diambil administrasi pemerintahan sangat ditentukan oleh politisi yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan, dimana hal ini sejalan dengan teori agensi (Sørensen & Torfing, 2011; dalam Pradana et al., 2022a). Keberlanjutan inovasi sektor publik ini dapat dikatakan sangat bergantung dengan dukungan politik dari pemimpin pemerintahan (Cinar et al., 2021; Pradana et al., 2022a).

Faktor berikutnya yang menjadi elemen kunci kesuksesan inovasi pada sektor publik adalah peran dari manajemen publik (Walker, 2014; Pradana et al., 2022a). Aspek dalam manajemen publik tersebut adalah peran manajer publik yang bertindak sebagai pelopor inovasi (Pradana et al., 2022a), budaya

organisasi yang mendukung (Wynen et al., 2020; Pradana et al., 2022a), stabilitas, profesionalisme, otonomi, dan insentif innovator (Demircioglu, 2021; Pradana et al., 2022a) serta faktor keuangan dan regulasi yang mempengaruhi implementasi inovasi (Cinar et al., 2021).

Faktor karakteristik dari inovasi itu sendiri juga berpengaruh terhadap keberlanjutan dari inovasi. (De Vries et al., 2016; Pradana et al., 2022a), menegaskan bahwa keberlanjutan inovasi dipengaruhi oleh sejauh mana inovasi tersebut dapat memberikan manfaat (*usefulness*), meningkatkan kinerja organisasi (*performance*) (Lyver & Lu, 2018; Pradana et al., 2022a) serta apakah program lain yang telah stabil dalam organisasi dapat diintegrasikan dengan inovasi tersebut (Pradana et al., 2022a). Kejelasan manfaat, dampak berupa peningkatan efektivitas organisasi dan kemampuan inovasi untuk dapat terintegrasi dengan system mapan yang sudah ada merupakan modal bagi inovasi agar dapat bertahan dalam jangka panjang.

Faktor berikutnya adalah faktor lingkungan eksternal atau kondisi di luar organisasi yang mendorong inovasi. Clausen et al. (2020) dan Pradana et al. (2022a) berpendapat bahwa pemicu utama organisasi untuk berinovasi adalah perubahan dan tekanan eksternal. Aspek dalam faktor eksternal tersebut adalah kolaborasi dengan pihak lain seperti sektor

swasta, masyarakat dan akademisi (Sørensen & Torfing, 2011; Pradana et al., 2022a), tekanan atau mandat politik dari atas (*top-down*) (Andersen & Jakobsen, 2018), serta tren sosial atau kebijakan yang berkembang di tingkat global ataupun lokal (Korac et al., 2017).

Penelitian kualitatif Pradana et al. (2022a) menemukan dua temuan utama berkaitan dengan keberlanjutan inovasi di sektor publik setelah terjadi pergantian pemimpin local. Temuan pertama adalah kondisi inovasi setelah diterapkan dalam organisasi yang dapat dikategorikan menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah inovasi yang tidak berlanjut (*non-sustained*), kedua adalah berlanjut dalam skala kecil (*sustained on a small scale*), dan ketiga adalah *sustained on a full scale and institutionalized* atau berlanjut sepenuhnya dan menjadi bagian dari struktur organisasi.

Temuan berikutnya adalah factor-faktor kritis dalam keberlanjutan inovasi, dimana Pradana et al. (2022a) mengelompokkannya menjadi empat kategori utama. Temuan ini juga menguatkan temuan dari penelitian van Acker & Bouckaert (2018) yang menunjukkan bahwa faktor politik adalah elemen paling berpengaruh dalam keberlanjutan inovasi. Kategori pertama adalah faktor politik dalam organisasi pemerintahan yang mencakup aspek peran dan karakteristik pemimpin, interaksi pemimpin politik dengan pemangku kepentingan,

komitmen pejabat politik terhadap inovasi, dukungan terhadap agenda politik lainnya, serta preferensi dan sikap individu pemimpin politik terhadap inovasi. Faktor kedua adalah manajemen publik dengan aspek peran manajer publik sebagai pendukung utama inovasi, kemampuan manajer melobi pemimpin politik baru, budaya organisasi, peran pelaksana inovasi, dan dukungan anggaran serta inovasi.

Faktor kritis berikutnya adalah karakteristik inovasi itu sendiri yang mana mencakup aspek kebermanfaatan inovasi bagi pemimpin politik, kemampuan inovasi tersebut untuk dapat terintegrasi dengan program lain dan kinerja inovasi yang dapat mencapai target jangka pendek dan jangka panjang. Faktor kritis terakhir adalah faktor lingkungan eksternal yang juga memainkan peranan penting dalam keberlanjutan inovasi. Faktor lingkungan eksternal mencakup aspek efektivitas kolaborasi dengan mitra eksternal, adanya pengaruh perubahan tren kebijakan dan isu sosial serta tekanan dari kebijakan pemerintah pusat.

Penelitian kualitatif Widodo et al. (2022) juga meneliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dari inovasi. Penelitian tersebut setidaknya memiliki temuan berupa lima faktor berupa pembelajaran organisasi dan inovasi terbuka, inovasi berbasis data, keterlibatan pemangku kepentingan, dukungan regulasi, serta keberlanjutan keuangan. Faktor pembelajaran organisasi

tercermin pada kemampuan inovator dalam menangkap umpan balik dari para penerima manfaat (*stakeholder*) inovasi yang awalnya memberikan penolakan atau resisten terhadap inovasi tersebut. Apabila para inovator tersebut dapat menangkap dan memahami apa yang diinginkan *stakeholder* tersebut, maka inovasi akan bisa berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan konsep *open innovation*.

Faktor kedua adalah inovasi yang berbasis data sebagai efek kelanjutan dari faktor pertama. Umpan balik yang terjadi pada faktor pembelajaran organisasi dan inovasi terbuka di atas seharusnya telah diarsipkan dalam bentuk data. Arsip data yang jelas dan akurat tersebut bukanlah hanya asumsi dan kebiasaan lama saja. Data-data yang digunakan dapat berupa hasil penelitian, data lapangan dan wawancara dengan pelaksana serta penerima manfaat inovasi. Faktor ketiga adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Salah satu temuan Widodo et al. (2022) menyebutkan bahwa semakin banyak pihak yang dilibatkan dalam sebuah inovasi, maka semakin besar rasa memiliki inovasi tersebut. Hal ini akan berimplikasi pada peran dan tanggung jawab dapat terbagi secara merata kepada masing-masing pihak sehingga keberlanjutan inovasi tetap terjaga.

Faktor keempat adalah dukungan regulasi. Dukungan regulasi yang kuat akan berdampak

pada penjaminan alokasi anggaran untuk program inovasi, kepastian keberlanjutan sumber daya manusia termasuk perekrutan dan gaji pegawai, serta dukungan terhadap pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan. Selain itu, dukungan regulasi juga akan berdampak pada “pemaksaan” berbagai lembaga untuk menggunakan inovasi secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari kebijakan yang harus dijalankan oleh semua pihak terkait. Keberlanjutan keuangan menjadi faktor terakhir yang juga sebagai faktor yang masih berhubungan dengan faktor regulasi. Keberlanjutan keuangan tercermin pada ketersediaan anggaran pemerintah untuk memfasilitasi program keberlanjutan dari inovasi itu sendiri. Tanpa ada kepastian dana jangka panjang, inovasi berisiko gagal di masa depan dan *stakeholder* tidak dapat merasakan manfaat inovasi tersebut.

Thøgersen et al. (2021) mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi inovasi publik. Faktor pertama adalah peran aktor kunci dalam inovasi sektor publik yaitu para pejabat terpilih, manajer publik dan pegawai yang bekerja langsung dalam operasional sehari-hari (Thøgersen et al., 2021). Faktor berikutnya adalah pengaruh ukuran organisasi yang merupakan salah satu variabel kunci dalam menilai kapasitas inovasi sektor publik. Keunggulan berupa fasilitas yang kompleks, keterampilan beragam, dan kapasitas

teknologi tinggi biasanya dimiliki oleh organisasi besar. Organisasi besar juga seringkali dianggap terlalu birokratis, tidak fleksibel dan kurang efisien ketika beradaptasi dengan perubahan.

Faktor berikutnya menurut De Vries et al. (2016) dan Thøgersen et al. (2021) adalah jenis inovasi itu sendiri. Penelitian sistematik revidu De Vries et al. (2016) mengelompokkan inovasi menjadi empat jenis utama, yaitu inovasi proses, inovasi produk atau layanan, inovasi tata kelola dan inovasi konseptual yang juga sejalan dengan inovasi barometer yang dikemukakan oleh (Thøgersen et al., 2021). Faktor-faktor tersebut juga oleh (Thøgersen et al., 2021) menjadi faktor yang dilakukan uji empiris dalam penelitiannya.

Penelitian sistematik literatur revidu (Criado et al., 2023) telah mencoba menganalisis perkembangan literatur selama dua dekade terakhir dan menyusun kerangka kerja terkini. 169 studi empiris di berbagai negara dengan pendekatan beragam menjadi data dari penelitian ini untuk memberikan tipologi baru dalam pengklasifikasian dan pengembangan teori tentang inovasi di sektor publik. Beberapa temuan penelitian ini adalah mulai semakin maraknya penelitian tentang inovasi di sektor publik setidaknya di sepuluh tahun terakhir, dimana penerbit terbanyak berasal dari jurnal *Public Management Review*. Hal ini mencerminkan bahwa penelitian di bidang inovasi sektor publik semakin berkembang

sebagai salah satu sub-bidang penelitian di dalam Manajemen khususnya Manajemen Publik.

Temuan lainnya berkaitan dengan strategi implementasi inovasi sektor publik. Strategi implementasi inovasi berperan penting dalam keberhasilan inovasi agar dapat diterapkan dan digunakan secara berlanjut. Penelitian Criado et al. (2023) menemukan bahwa belum ada klasifikasi ketat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi inovasi sehingga Criado et al. (2023) membedakan struktur dan mekanisme sebagai elemen utama dalam proses implementasi. Struktur adalah aturan formal dan informal yang berpengaruh terhadap implementasi inovasi. Mekanisme adalah tindakan konkret atau aktivitas yang harus dilakukan guna penerapan inovasi. Elemen lainnya yang mempengaruhi adalah peran kepemimpinan dan sumber daya manusia, pengaruh *New Public Management*, serta pendanaan terhadap implementasi inovasi.

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model pada Sektor Publik

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model adalah kerangka konseptual yang dirancang untuk menjelaskan niat pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan perilaku penggunaan selanjutnya. UTAUT mengintegrasikan delapan komponen

penting model penerimaan teknologi untuk memberikan gambaran komprehensif dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan adopsi dari teknologi (Momani, 2020).

UTAUT model mengidentifikasi empat variabel konstruk yang secara langsung memengaruhi penerimaan pengguna dan perilaku penggunaan dari teknologi dan inovasi (Momani, 2020), yaitu:

- 1) *Performance Expectancy*: Tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan teknologi dan inovasi akan membantu mereka mencapai peningkatan kinerja pekerjaan.
- 2) *Effort Expectancy*: Tingkat kemudahan yang terkait dengan penggunaan teknologi dan inovasi.
- 3) *Social Influence*: Tingkat persepsi individu karena orang lain mempercayai bahwa harus menggunakan teknologi dan inovasi.
- 4) *Facilitating Conditions*: Tingkat keyakinan individu bahwa infrastruktur organisasi dan teknis dapat mendukung penggunaan teknologi dan inovasi.

Model ini juga menyertakan empat variabel penguat atau moderasi yang mempengaruhi dampak dari variabel konstruk utama di atas dalam kaitannya dengan perilaku pengguna (Momani, 2020), yaitu gender, umur, pengalaman penggunaan sebelumnya, dan kesediaan untuk menggunakan teknologi dan

inovasi itu sendiri. UTAUT model merupakan kerangka kerja kuat yang telah masif digunakan untuk memahami penerimaan teknologi dan perilaku penggunaannya (Momani, 2020) (Venkatesh et al., 2012). Model UTAUT merupakan model yang pada dasarnya mengukur niat pengguna untuk menggunakan suatu sistem, teknologi, atau inovasi. Pada dasarnya, seseorang akan menggunakan teknologi jika ia memiliki niat untuk menggunakannya. Namun, untuk terus menggunakannya, harus ada kepuasan terhadap penggunaannya.

Model UTAUT merupakan model penyempurnaan dari teori-teori tentang tingkat penerimaan inovasi oleh pengguna sebelumnya. Teori Difusi Inovasi, *Theory of Reasined Action* (TRA), *Technology Acceptance Model* (TAM), *Technology Acceptance Model* merupakan landasan dari model ini (Momani, 2020; Mazzarol & Reboud, 2020). Teori-teori sebelumnya mengidentifikasi keberhasilan suatu inovasi dan teknologi untuk dapat diterima oleh pengguna setidaknya dipengaruhi oleh empat faktor utama. Faktor pertama adalah manfaat dari inovasi itu, apakah berguna atau tidak, faktor kedua adalah kemudahan penggunaan inovasi, kerumitan sistem, dan pengaruh sosial atau persepsi orang di sekitar pengguna inovasi (Momani, 2020). Model ini telah diperluas dan disesuaikan dengan berbagai

konteks dan (Momani, 2020) (Venkatesh et al., 2012).

UTAUT model juga telah diperluas dan disesuaikan pada sektor publik guna memahami tingkat penerimaan sebuah inovasi dan teknologi. Model ini adalah *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology in Public Setor Innovation* (UTAUT-IPS) yang secara spesifik disesuaikan untuk sektor publik. Model ini menguji fakto-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi pada manajer sektor publik dan penggunaan praktik-praktik inovatif. Faktor-faktor kunci ini antara lain berupa *governance paradigm*, *performance expectancy*, dan *motivation and behavioral variables* (Peralta & Rubalcaba, 2021). Model ini dapat membantu menggambarkan proses pembuatan keputusan kompleks yang terjadi pada inovasi, khususnya di sektor publik, dan memberikan pendekatan yang berbeda berdasarkan pengaruh yang mendorong para manajer publik (Peralta & Rubalcaba, 2021).

UTAUT-IPS model dirancang untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi inovasi oleh para manajer sektor publik. Model ini mengelompokkan manajer sektor publik berdasarkan motivasi dan pengaruh mereka, serta memberikan berbagai pendekatan terhadap inisiatif inovasi dan penciptaan bersama (Peralta & Rubalcaba, 2021). UTAUT-IPS telah banyak

diterapkan untuk mempelajari dampak dari inisiasi transformasi digital, memberikan penegasan atas pentingnya penyelarasan strategis dengan inisiatif pemerintah dan peran pengaruh sosial dalam adopsi teknologi (Alzarooni et al., 2024). Model UTAUT-IPS juga telah digunakan untuk memahami tingkat penerimaan layanan *e-Government*, mengintegrasikan konstruk dari berbagai teori penerimaan teknologi untuk memberikan pemahaman komprehensif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi dari inovasi di sektor publik (Sang et al., 2009).

Model UTAUT-IPS sendiri menambahkan variabel berupa paradigma tata kelola (*governance paradigms*). Paradigma tata kelola merupakan cerminan pendekatan institusional pada inovasi publik yang mencakup *Traditional Public Administration* (TPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Governance/Public Service Logic* (NPG/PSL). Variabel ini mencerminkan pendekatan berbeda dalam sifat dan cara produksi layanan publik, baik melalui hierarki (TPA), pasar (NPM), dan jaringan (NPG/PSL). Governance paradimng dianggap sebagai “rezim kebijakan dan implementasi” yang mencerminkan cara merancang dan melaksanakan kebijakan publik serta penyediaan layanan publik secara berbeda (Peralta & Rubalcaba, 2021). Tiap paradigma (TPA, NPM, NPG/PSL) secara teoritis

mempengaruhi cara inovasi dirancang dan ditetapkan dalam sektor publik.

Organisasi publik sendiri bisa mengadopsi lebih dari satu paradigma ini secara bersamaan. Oleh karena itu, menyertakan variabel *governance paradigms* penting karena variabel ini mewakili determinan struktural dan institusional dari adopsi inovasi, memungkinkan model untuk mencerminkan kompleksitas nyata dalam sektor publik, khususnya dalam hal desain dan implementasi inovasi, serta meningkatkan relevansi dan akurasi UTAUT untuk menjelaskan perilaku adopsi inovasi di sektor publik, yang sering kali dipengaruhi oleh struktur pemerintahan yang kompleks dan beragam (Peralta & Rubalcaba, 2021).

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology for Innovation in the Public Sector (UTAUT-IPS) Model pada Sektor Publik Indonesia

UTAUT-IPS dapat menjadi pendekatan komprehensif untuk mengatasi permasalahan keberlanjutan implementasi inovasi di Indonesia. Temuan-temuan penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan inovasi sejalan dengan aspek-aspek yang ditawarkan dalam UTAUT-IPS model. Faktor-faktor kritis seperti faktor politik, peran manajemen publik, keterlibatan pemangku kepentingan, dukungan regulasi, dan *New Public Management* relevan dengan faktor

Governance Paradigm pada konsep UTAUT-IPS. Selain itu, faktor kritis berupa karakteristik dari inovasi dan inovasi berbasis data sejalan dengan konsep *Performance Expectancy* pada model UTAUT-IPS. Sedangkan konsep *Facilitating Condition* yang merupakan dukungan infrastruktur dan organisasi relevan dengan faktor keberlanjutan keuangan dan pengaruh ukuran organisasi.

Faktor politik sebagai faktor berpengaruh dalam keberlanjutan inovasi yang menjadi temuan penelitian Lapuente & Suzuki (2020), Pradana et al. (2022a), Thøgersen et al. (2021) berkaitan dengan paradigma tata kelola yang diadopsi dalam suatu organisasi publik. Faktor politik ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan dalam konteks cara memproduksi dan mengimplementasikan inovasi. Kebijakan yang bersifat hierarkis (TPA), pasar (NPM) dan jaringan (NPG/PSL) menunjukkan cara merancang dan melaksanakan kebijakan publik serta bagaimana cara inovasi dirancang dan diterapkan (Peralta & Rubalcaba, 2021). *Governance paradigm* (GP) juga berkaitan erat dengan temuan faktor manajemen publik yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan inovasi dari penelitian Lapuente & Suzuki (2020) dan Pradana et al. (2022a) serta faktor *New Public Management* dari Criado et al. (2023).

GP juga berkaitan erat dengan faktor keterlibatan pemangku kepentingan yang

ditemukan oleh penelitian Widodo et al. (2022). GP dalam konteks ini berkaitan dengan keterlibatan pemangku kepentingan dikarenakan adanya aspek GP berupa *citizen role* atau peran warga sebagai pengguna inovasi. Penelitian Widodo et al. (2022), menemukan bahwa semakin pemangku kepentingan terlibat lebih dalam implementasi inovasi, maka tingkat keberlanjutan inovasi semakin tinggi. Peran warga sebagai pengguna inovasi dalam konteks GP sangat mewakili pemangku kepentingan karena peran warga sebagai pengguna ditentukan GP yang diterapkan dalam suatu organisasi (Peralta & Rubalcaba, 2021).

Faktor dukungan regulasi yang merupakan temuan dari penelitian Widodo et al. (2022) juga berkaitan erat dengan konteks GP. Widodo et al. (2022) menggarisbawahi bahwa dukungan regulasi yang bersifat “memaksa” dapat mempengaruhi tingkat penggunaan inovasi setelah inovasi diluncurkan. Di lain sisi, GP sebagai cerminan bagaimana kebijakan dalam hal produksi dan implementasi inovasi dan teknologi (Peralta & Rubalcaba, 2021) erat kaitannya dengan faktor dukungan regulasi ini.

Faktor karakteristik dari inovasi itu sendiri yang berpengaruh terhadap tingkat keberlanjutan inovasi sektor publik (Lapuente & Suzuki, 2020); (Pradana et al., 2022a); (De Vries et al., 2016); (Thøgersen et al., 2021) berkaitan dengan *performance expectancy* (PE).

Karakteristik inovasi ini berkaitan dengan aspek sejauh mana inovasi tersebut dapat bermanfaat bagi pengguna (*usefulness*) untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pradana et al. (2022a), dalam penelitiannya juga menemukan bahwa karakteristik inovasi ini berkaitan dengan aspek kebermanfaatan inovasi untuk dapat menjangkau kinerja dan target jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep faktor *performance expectancy* (PE) pada model UTAUT-IPS yang menekankan adanya harapan kinerja yang meningkat dari pengguna setelah menggunakan inovasi dan teknologi (Peralta & Rubalcaba, 2021).

PE juga berkaitan erat dengan temuan Widodo et al. (2022) berupa inovasi berbasis data. Inovasi dengan data yang akurat tentunya akan dapat memberikan manfaat lebih terhadap kinerja pengguna. Hal ini dikarenakan *output* berbasis data akurat dan jelas akan menghasilkan *output* yang berguna bagi kinerja pengguna (Widodo et al., 2022). Faktor PE dalam konteks ini dapat menjembatani harapan tersebut agar karakter inovasi yang berbasis data dapat memberikan *output* yang jelas dan akurat. PE sebagai faktor keyakinan individu untuk mencapai kebermanfaatan setelah menggunakan inovasi dan teknologi (Venkatesh et al., 2012) juga dapat menjawab aspek harapan dapat terintegrasinya inovasi baru dengan inovasi yang lama pada faktor karakteristik inovasi. Dengan kemampuan inovasi dapat terintegrasi

pada sistem yang telah mapan sebelumnya, otomatis harapan kebermanfaatan inovasi oleh pengguna akan terpenuhi.

Faktor berikutnya yang menjadi faktor kritis keberlanjutan inovasi berupa pengaruh ukuran organisasi (Thøgersen et al., 2021) berkaitan erat dengan faktor *facilitating condition* (FC) pada konsep UTAUT-IPS. Pengaruh ukuran organisasi pada penelitian Thøgersen et al. (2021) diidentifikasi berupa keunggulan fasilitas yang kompleks, keterampilan beragam dan kapasitas teknologi yang mendukung keberlanjutan pada organisasi besar. Aspek-aspek tersebut berkaitan erat dengan FC karena FC merupakan dukungan infrastruktur dan organisasi yang mempengaruhi penerimaan inovasi oleh pengguna dalam konsep UTAUT-IPS (Chomistriana et al., 2024). FC juga dapat menjembatani faktor kritis berupa keberlanjutan keuangan yang merupakan temuan penelitian Widodo et al. (2022). Widodo et al. (2022) menemukan bahwa faktor keberlanjutan keuangan tercermin pada ketersediaan anggaran pemerintah untuk memfasilitasi keberlanjutan dari inovasi. Dukungan infrastruktur berupa anggaran pada FC dapat menjawab faktor kritis ini sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan inovasi (Alzarooni et al., 2024).

Faktor kritis berikutnya adalah faktor eksternal yang merupakan kondisi di luar organisasi yang mendorong inovasi. Aspek

dalam faktor ini adalah kolaborasi dengan pihak lain seperti sektor swasta, masyarakat, dan akademisi (Sørensen & Torfing, 2011; Pradana et al., 2022a), tekanan atau mandat politik dari atas (Andersen & Jakobsen, 2018), serta tren sosial atau kebijakan yang berkembang di tingkat global dan lokal (Korac et al., 2017). Aspek tren sosial relevan dan dapat terjawab dengan konsep *social influence* (SI) yang merupakan tingkat persepsi individu untuk menggunakan inovasi karena adanya penagruh sosial dari luar (Lang & Molloy, 2013). Sedangkan aspek tekanan atau mandat politik dari atas (*top-down*) dan kebijakan yang berkembang di tingkat global dan lokal terpenuhi dengan konsep GP. GP yang merupakan dasar kebijakan dalam praktik dan impkementasi inovasi dalam pelayanan publik (Peralta & Rubalcaba, 2021) relevan dengan aspek mandat politik dan kebijakan yang berkembang di tingkat global dan lokal.

Kesimpulan

Keberlanjutan inovasi sektor publik di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan meskipun terdapat berbagai inisiatif dan kebijakan untuk mendorong penciptaan inovasi, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Berbagai studi meunjukkan bahwa sebagian besar inovasi yang telah dikembangkan tidak mampu bertahan dalam jangka panjang, baik kaerna faktor internal

seperti lemahnya manajemen publik dan institusionalisasi, maupun faktor eksternal seperti tekanan politik dan dinamika sosial.

Tulisan ini menekankan pentingnya membangun pemahaman konseptual yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan inovasi. Dengan mengintegrasikan pendekatan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology for Innovation in the Public Sector* (UTAUT-IPS), literatur review ini menawarkan kerangka teoritis yang mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana berbagai variabel seperti paradigma tata kelola, harapan kinerja, kondisi fasilitasi, pengaruh sosial, dan niat berperilaku pengguna berkontribusi terhadap adopsi dan keberlanjutan inovasi di sektor publik.

Model UTAUT-IPS terbukti relevan dalam mengkaji koompleksitas sektor publik Indonesia yang dipenagruhi oleh struktur pemerintahan yang hirarkis, birokratis, dan sering berubah secara politis. Dengan menyelaraskan faktor-faktor kunci dari literatur empiris dengan elemen dalam UTAUT-IPS, literatur review ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik keberlanjutan inovasi publik, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih aplikatif untuk membangun tata kelola inovasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang bersifat konseptual, sehingga tidak menyajikan data empiris primer untuk menguji validitas model UTAU-IPS secara langsung dalam konteks organisasi sektor publik di Indonesia. Selain itu, sebagian besar literatur yang dianalisis masih berfokus pada perspektif umum tanpa diferensiasi spesifik antar jenis inovasi atau level pemerintahan. Oleh karena itu, hasil kajian ini perlu dikaji ulang melalui pendekatan empiris di masa mendatang guna memperkuat generalisasi temuan dan menguji hubungan antar variabel secara kontekstual.

Saran dan Arah Penelitian Lanjutan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan keberlanjutan inovasi sektor publik di Indonesia, yaitu:

1) Penguatan Institusionalisasi dalam Organisasi Publik

Inovasi perlu dilembagakan sebagai bagian dari sistem dan rutinitas organisasi, bukan hanya sebagai proyek sementara. Pemerintah perlu menyusun kebijakan dan mekanisme internal yang memastikan inovasi menjadi bagian dari proses kerja jangka panjang, termasuk integrasinya dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

2) Penerapan Model UTAUT-IPS secara Empiris dalam Konteks Indonesia

Studi mendatang perlu menguji secara empiris model UTAUT-IPS dalam konteks organisasi sektor publik Indonesia. Penelitian kuantitatif berbasis survei atau studi kasus kualitatif mendalam akan memperkuat validitas model ini serta memperjelas hubungan antar faktor seperti *governance paradigm*, *performance expectancy*, dan *behavioral intention* dalam mendukung keberlanjutan inovasi.

3) Peningkatan kapasitas dan Peran Aktor Kunci

Dukungan dari pemimpin politik dan manajer publik sangat krusial. Pelatihan kepemimpinan inovatif dan program *capacity building* yang berkelanjutan dapat memperkuat peran aktor-aktor kunci dalam mendirikan dan mempertahankan inovasi. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi peran *champion* inovasi dan dinamika hubungannya dengan pemangku kepentingan lainnya.

4) Pengembangan Sistem Umpan Balik dan Inovasi Berbasis Data

Inovasi yang berkelanjutan perlu didukung oleh sistem *feedback* yang responsif dan berbasis data. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data yang memungkinkan adaptasi dan pengembangan berkelanjutan

terhadap kebutuhan masyarakat.

5) Perluasan Cakupan Partisipasi pemangku Kepentingan

Tingkat keberlanjutan inovasi dapat ditingkatkan dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat, sketor swasta, dan komunitas akademik sejak taha perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Penelitian masa depan dapat menggali lebih dalam model *co-creation* dalam inovasi sektor publik di Indonesia.

6) Peningkatan Sinergi antara Regulasi, Keuangan, dan Teknologi

Regulasi yang adapti, dukungan pendanaan jangka panjang, dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi menjadi prasyarat penting. Penelitian lanjutan dapat mengemmbangkan model kebijakan terpadu yang mampu mensinergikan ketiga aspek ini secara holistik untuk mendukung kelangsungan inovasi.

Referensi

Alzarooni, A. I., Alhashmi, S. M., Lataifeh, M., & Rice, J. (2024). Navigating Digital Transformation in the UAE: Benefits, Challenges, and Future Directions in the Public Sector. *Computers*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/computers13110281>

Andersen, S. C., & Jakobsen, M. L. (2018). Political Pressure, Conformity Pressure,

and Performance Information as Drivers of Public Sector Innovation Adoption. *International Public Management Journal*, 21(2), 213–242. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1425227>

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. (2019, December). *RPJMN 2020-2024: Targetkan Daerah dengan Indeks Inovasi Tinggi 36% – BSKDN*. https://bskdn.kemendagri.go.id/website/rpjm-2020-2024-targetkan-daerah-dengan-indeks-inovasi-tinggi-36/?utm_source=chatgpt.com

Bankins, S., Denness, B., Kriz, A., & Molloy, C. (2017). Innovation Agents in the Public Sector: Applying Champion and Promotor Theory to Explore Innovation in the Australian Public Service. *Australian Journal of Public Administration*, 76(1), 122–137. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12198>

Bekkers, V., Jurian, E., & Steijn, B. (2011). *Innovation in the Public Sector* (V. Bekkers, J. Edelenbos, & B. Steijn, Eds.). Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230307520>

Borins, S. (2000). 46 / What Border? Public Management Innovation in the United States and Canada What Border? Public Management Innovation in the United States and Canada. In *Journal of Policy Analysis and Management* (Vol. 19, Issue 1).

- Chomistrina, D., Mulyono, A. T., & Najid. (2024). Predicting Adoption Behaviour to Digital Government Transformation in Construction Sector. *Journal of Construction in Developing Countries*, 29(2), 181–205. <https://doi.org/10.21315/JCDC-12-23-0177>
- Cinar, E., Trott, P., & Simms, C. (2021). An international exploration of barriers and tactics in the public sector innovation process. *Public Management Review*, 23(3), 326–353. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1668470>
- Clausen, T. H., Demircioglu, M. A., & Alsos, G. A. (2020). Intensity of innovation in public sector organizations: The role of push and pull factors. *Public Administration*, 98(1), 159–176. <https://doi.org/10.1111/padm.12617>
- Cobian, K. P., & Ramos, H. V. (2021). A cross-case analysis of developing program sustainability and institutionalization in early stages of a multisite biomedical student diversity initiative. *BMC Medical Education*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-021-02663-2>
- Criado, J. I., Alcaide-Muñoz, L., & Liarte, I. (2023). Two decades of public sector innovation: building an analytical framework from a systematic literature review of types, strategies, conditions, and results. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2254310>
- De Vries, H., Bekkers, V., & Tummars, L. (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. *Public Administration*, 94(1), 146–166. <https://doi.org/10.1111/padm.12209>
- Demircioglu, M. A. (2021). Sources of Innovation, Autonomy, and Employee Job Satisfaction in Public Organizations. *Public Performance and Management Review*, 44(1), 155–186. <https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1820350>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024, February 1). *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Perkuat Keberlanjutan Kualitas dan Replikasi Inovasi, Pelaksanaan KIPP Tahun 2024 Ditiadakan*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/perkuat-keberlanjutan-kualitas-dan-replikasi-inovasi-pelaksanaan-kipp-tahun-2024-ditiadakan>
- Korac, S., Saliterer, I., & Walker, R. M. (2017). Analysing the environmental antecedents of innovation adoption among politicians and public managers. *Public Management Review*, 19(4), 566–587.

- <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1200119>
- Lang, M., & Molloy, L. (2013). An Investigation into the Factors which Influence the Adoption of Green IT: A Case Study of an Irish Public Sector Organisation. *IGI Global*, 200–207. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-1972-2.ch012>
- Lapiente, V., & Suzuki, K. (2020). Politicization, Bureaucratic Legalism, and Innovative Attitudes in the Public Sector. *Public Administration Review*, 80(3), 454–467. <https://doi.org/10.1111/puar.13175>
- Lyver, M. J., & Lu, T. J. (2018). Sustaining innovation performance in SMEs: Exploring the roles of strategic entrepreneurship and IT capabilities. *Sustainability (Switzerland)*, 10(2). <https://doi.org/10.3390/su10020442>
- Mawangi, G. T. (2024, October 15). *H-5 pelantikan, ini 17 program prioritas Prabowo-Gibran* - ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4398373/h-5-pelantikan-ini-17-program-prioritas-prabowo-gibran?utm_source=chatgpt.com
- Mazzarol, T., & Reboud, S. (n.d.). *Entrepreneurship and Innovation*. <http://www.springer.com/series/10099>
- Momani, A. M. (2020). The unified theory of acceptance and use of technology: A new approach in technology acceptance. *International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development*, 12(3), 79–98. <https://doi.org/10.4018/IJSKD.2020070105>
- Open Government in Indonesia*. (2016). <https://doi.org/10.1787/ISBN>
- Peralta, A., & Rubalcaba, L. (2021). How governance paradigms and other drivers affect public managers' use of innovation practices. A pls-sem analysis and model. *Mathematics*, 9(9). <https://doi.org/10.3390/math9091055>
- Pradana, I. P. Y. B., Susanto, E., & Kumorotomo, W. (2022a). Analyzing the critical factors for innovation sustainability in the public sector: evidence from Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 35(7), 733–748. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2022-0044>
- Pradana, I. P. Y. B., Susanto, E., & Kumorotomo, W. (2022b). Bibliometric Analysis of Public Sector Innovation. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(3), 297–315. <https://doi.org/10.22146/jsp.69862>
- Pratama, A. B. (2020). The landscape of public service innovation in Indonesia: A comprehensive analysis of its characteristic and trend. *Innovation and Management Review*, 17(1), 25–40.

- <https://doi.org/10.1108/INMR-11-2018-0080>
- Sang, S., Lee, J. D., & Lee, J. (2009). An empirical study on the determinants of user acceptance of e-Government in public sector. *WEBIST 2009 - Proceedings of the 5th International Conference on Web Information Systems and Technologies*, 540–545. <https://doi.org/10.5220/0001839905400545>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. *Administration and Society*, 43(8), 842–868. <https://doi.org/10.1177/0095399711418768>
- Thøgersen, D., Waldorff, S. B., & Steffensen, T. (2021). Public Value through Innovation: Danish Public Managers' Views on Barriers and Boosters. *International Journal of Public Administration*, 44(14), 1264–1273. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1750030>
- van Acker, W., & Bouckaert, G. (2018). What makes public sector innovations survive? An exploratory study of the influence of feedback, accountability and learning. *International Review of Administrative Sciences*, 84(2), 249–268. <https://doi.org/10.1177/0020852317700481>
- Venkatesh, V., Walton, S. M., & Thong, J. Y. L. (2012). *Quarterly Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology I*. <https://doi.org/10.5220/0001839905400545>
- Walker, R. M. (2014). Internal and External Antecedents of Process Innovation: A review and extension. *Public Management Review*, 16(1), 21–44. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.771698>
- Widodo, S., Marpaung, Z. S., & Santoso, A. D. (2022). What Makes Public Sector Innovation Sustainable?: A Case Study from Indonesia. *TEM Journal*, 11(3), 1376–1384. <https://doi.org/10.18421/TEM113-48>
- Wynen, J., Boon, J., Kleizen, B., & Verhoest, K. (2020). How Multiple Organizational Changes Shape Managerial Support for Innovative Work Behavior: Evidence From the Australian Public Service. *Review of Public Personnel Administration*, 40(3), 491–515. <https://doi.org/10.1177/0734371X18824388>